

Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Kabupaten Solok dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Fajri Afrizal¹, Syafwandi²

Universitas Putra Indonesia YPTK^{1,2}

Email: Fajriafrizal@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 8
Bulan : Agustus
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

This study develops the strategic plan for the government section of Solok to enhance the effectiveness and efficiency of regional government administration. The method employed is qualitative research based on literature review and analysis of official documents related to strategic planning and governmental governance. SWOT analysis is used to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced by the governance section of Solok Regency. The findings highlight the importance of strengthening human resource capacity, refining work procedures, integrating information technology, and improving coordination among units and stakeholders as main strategic steps. The formulated strategic plan includes vision, mission, goals, targets, as well as priority programs and activities that support sustainable regional development. The recommendations aim to serve as a foundation for improving performance and governance of Solok Regency government in coping with the dynamics of governance and increasing demands for public service.

Keyword: *strategic planning, regional government, Solok Regency, SWOT analysis, governance.*

Abstrak

Penelitian ini menyusun rencana strategis bagian pemerintahan Kabupaten Solok untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi literatur dan analisis dokumen resmi terkait perencanaan strategis dan tata kelola pemerintahan daerah. Analisis SWOT diterapkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh bagian pemerintahan Kabupaten Solok. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur kerja, integrasi teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi antar unit dan pemangku kepentingan sebagai langkah strategis utama. Rencana strategis yang dirumuskan meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan prioritas yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini diharapkan menjadi dasar peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Solok dalam menghadapi dinamika pemerintahan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Kata Kunci: *rencana strategis, pemerintahan daerah, Kabupaten Solok, analisis SWOT, tata kelola.*

A. PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) bagian pemerintahan Kabupaten Solok merupakan dokumen yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selaras dengan visi, misi, serta kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Penyusunan Renstra bertujuan mengantisipasi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti perubahan regulasi, tuntutan peningkatan kualitas layanan publik, keterbatasan sumber daya, dan integrasi teknologi informasi dalam birokrasi. Renstra berperan sebagai pedoman kebijakan, alat pengendalian, dan evaluasi kinerja untuk memastikan program dan kegiatan yang dijalankan relevan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan analisis situasi internal dan eksternal menggunakan metode SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menjadi dasar perumusan strategi. Visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran kinerja dirumuskan untuk mengarahkan pelaksanaan program yang terukur dan berdampak nyata.

Renstra ini juga memuat mekanisme pelaksanaan serta sistem pengendalian yang meliputi monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis. Dengan Renstra, bagian pemerintahan Kabupaten Solok diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Teori perencanaan strategis menjelaskan bahwa perencanaan strategis adalah proses menetapkan visi dan misi organisasi, serta merumuskan tujuan dan strategi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam konteks pemerintahan daerah, perencanaan strategis berfokus pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Konsep tata kelola pemerintahan (*good governance*) menekankan prinsip transparansi, partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan *rule of law* sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Perencanaan strategis di pemerintahan daerah juga dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan nasional yang mengatur perangkat daerah dan

perencanaan pembangunan, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Studi terdahulu mengenai rencana strategis perangkat daerah menunjukkan pentingnya analisis situasi melalui pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah. Metode prioritas strategi seperti Analytic Hierarchy Process (AHP) juga sering digunakan untuk menentukan fokus pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Model analisis kinerja yang relevan mencakup indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPIs) yang mengukur capaian sasaran dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan. Pendekatan ini mendukung transparansi dan akuntabilitas serta menjadi dasar evaluasi pelaksanaan rencana strategis.

Regulasi terkait pemerintahan daerah yang menjadi acuan antara lain meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi perangkat daerah, serta kebijakan terkait reformasi birokrasi yang menuntut peningkatan profesionalisme dan inovasi dalam pelayanan publik.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi literatur dan analisis dokumen resmi terkait perencanaan strategis dan tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan ini memungkinkan pengkajian mendalam tanpa pengumpulan data primer di lapangan, melainkan melalui telaah literatur, kebijakan, dan dokumen perencanaan yang relevan.

Sumber data utama meliputi buku teori manajemen publik, artikel ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta regulasi terkait pemerintahan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah. Data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi bagian pemerintahan Kabupaten Solok. Sintesis konsep strategis dilakukan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, serta strategi dan program yang sesuai dengan kondisi nyata dan teori yang berlaku.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, data diverifikasi silang antar sumber literatur yang kredibel dan mutakhir di bidang tata kelola pemerintahan dan manajemen strategis. Validitas juga didukung oleh konsistensi konsep dan kesesuaian dengan kebijakan

pemerintah yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bagian Pemerintahan Kabupaten Solok

Bagian pemerintahan Kabupaten Solok merupakan unit kerja yang memiliki fungsi koordinasi, administrasi, pelayanan publik, dan pendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan. Struktur organisasi meliputi kepala bagian, beberapa seksi yang menangani urusan pemerintahan dalam, pemerintahan umum, dan administrasi wilayah. Sumber daya manusia pada bagian ini tersebar dari berbagai jenjang keahlian dengan kompetensi yang bervariasi sesuai tugas masing-masing.

Analisis SWOT

- **Kekuatan (Strengths):**
 - Struktur organisasi yang telah terbentuk sesuai regulasi.
 - SDM dengan pengalaman dan kompetensi dasar dalam administrasi pemerintahan.
 - Dukungan teknologi informasi dalam administrasi.
- **Kelemahan (Weaknesses):**
 - Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek manajemen strategis dan teknologi baru.
 - Prosedur kerja yang masih kurang standar dan belum dioptimalkan.
 - Koordinasi antar unit yang belum maksimal.
- **Peluang (Opportunities):**
 - Kemajuan teknologi informasi yang dapat diintegrasikan untuk mempercepat pelayanan dan administrasi.
 - Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang mendukung reformasi birokrasi.
 - Kebutuhan meningkat dari masyarakat untuk layanan yang transparan dan cepat.
- **Ancaman (Threats):**
 - Perubahan regulasi yang cepat dan dinamis yang memerlukan adaptasi cepat.
 - Kompetisi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
 - Risiko resistensi terhadap perubahan dalam organisasi.

Identifikasi Isu Strategis

- Meningkatkan kapasitas SDM dalam manajemen pemerintahan dan teknologi informasi.

- Penyempurnaan standar prosedur kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
- Membangun sistem koordinasi yang lebih baik antar unit dan dengan kecamatan serta nagari.
- Mengembangkan layanan publik yang responsif dan berbasis teknologi.

Perumusan Visi dan Misi

- **Visi:** Menjadi bagian pemerintahan yang profesional, transparan, dan inovatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan Kabupaten Solok yang berkualitas.
- **Misi:**
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem administrasi pemerintahan.
 - b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pelayanan dan administrasi.
 - c. Membangun sinergi dan koordinasi antar unit kerja serta dengan pemangku kepentingan.
 - d. Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Tujuan Strategis dan Sasaran

- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- Menstandarisasi dan menyempurnakan prosedur kerja dan administrasi.
- Meningkatkan integrasi teknologi informasi dalam pelayanan.
- Memperkuat koordinasi dan kemitraan dengan institusi terkait.

Alternatif Strategi dan Program Prioritas

- Program pelatihan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi.
- Penyusunan dan sosialisasi SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Implementasi sistem informasi manajemen pemerintahan.
- Penguatan forum koordinasi antar unit dan dengan pemerintahan kecamatan/nagari.

Mekanisme Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi

- Penyusunan rencana aksi tahunan yang terintegrasi dengan rencana kerja perangkat daerah.
- Monitoring berkala oleh pimpinan dan pengawasan internal melalui Inspektorat.
- Evaluasi kinerja menggunakan indikator kunci sesuai dengan sasaran strategis.
- Pelaporan hasil pencapaian dan umpan balik sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Rencana strategis bagian pemerintahan Kabupaten Solok disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui analisis SWOT, teridentifikasi kebutuhan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, menyempurnakan prosedur kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan koordinasi antarunit kerja dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan strategi ini, diharapkan pelayanan publik semakin berkualitas serta mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, direkomendasikan sejumlah langkah strategis seperti penyelenggaraan pelatihan aparatur secara berkala, standarisasi prosedur operasional, optimalisasi sistem informasi manajemen, serta penguatan sinergi dengan kecamatan, nagari, dan sektor swasta. Penerapan monitoring dan evaluasi rutin juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan perbaikan, sekaligus melakukan kajian berkala agar responsif terhadap dinamika perubahan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, tata kelola pemerintahan Kabupaten Solok diharapkan semakin kokoh, pelayanan publik meningkat, dan tujuan strategis daerah tercapai secara optimal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Solok. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok 2021–2026. Solok: Bappeda Kabupaten Solok.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Solok. (2023). Laporan Audit Internal dan Pengawasan Pengelolaan Pemerintahan. Solok: Inspektorat Kabupaten Solok.
- Mulyadi. (2019). Manajemen Strategis dan Perencanaan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, Y., & Wibowo, A. (2022). Analisis SWOT dalam Rencana Strategis Organisasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45-60.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wibowo, B., & Handayani, E. (2021). Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(2), 112-126.